

How does Pancasila work in countering radicalism and terrorism in Indonesia?

Jurnal Scientia Indonesia

2016, Vol. 2(2) 119-140

© The Author(s) 2016

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

Sri Dewi Ariyani
Universitas Negeri Semarang, Indonesia
sridewiariyani@gmail.com

History of Manuscript

Submitted :
Revised 1 :
Revised 2 :
Accepted :
Online since :

Abstract

Pancasila is a solution to the problems of radicalism that have hit Indonesia today. Then it is hoped that the values in Pancasila must be truly carried out by the Indonesian people to prevent and minimize radicalism and terrorism in our beloved country. The loss of values contained in Pancasila in Indonesian society is the basis of the emergence of various acts of radicalism & terrorism in Indonesia. Therefore, the implementation of Pancasila values, in order to remain current in the face of the threat of radicalism must be emphasized in the delivery of the following three messages: *first*, this country is formed based

on agreement and equality, in which no one should feel as a major shareholder, or first class citizen. *Second*, rules for playing in a state have been agreed upon, and the State has full sovereignty to bring order to the members of its country who try systematically to change the order, in ways that are against the law. *Third*, the state provides protection, opportunity, future and balanced protection to achieve the national goals of a just and prosperous society, prosperous, safe, civilized and free. The Indonesian government recently began to be aware of the development of radicalism in the country related to the ISIS network (the Islamic State of Iraq and Syria). This issue about ISIS has become a global issue and it seems the world is compact to fight it. Seeing this phenomenon, there needs to be steps to prevent acts of radicalism from flourishing on the earth. In addition to taking action on radicalism, the government must also prevent or preventive measures so that people are not easily provoked against ideologies that use religious attributes. Close collaboration between the government, security forces and religious leaders is needed to rectify religious understanding.

Keywords: Pancasila, Radicalism, ISIS

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang pluralis, yang mana kemajemukan hadir dan berkembang di dalamnya, kemajemukan tersebut terdiri dari suku, ras, budaya, dan agama. Indonesia tidak hanya kaya akan budaya yang beraneka ragam tetapi negara religius dengan beberapa keyakinan dan

kepercayaan yang mengikutinya. Di Indonesia, terdapat 6 agama yang diakui secara resmi di mata hukum yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Walaupun terdapat berbagai agama, Indonesia mampu dan dapat hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Semua keragaman suku, ras, budaya di Indonesia menjadikan Indonesia negara yang kaya karena semua terangkum menjadi satu yaitu sebuah ragam seni budaya yang ber- Bineka Tunggal Ika dengan menunjukkan adat ketimuran dan berasaskan Pancasila.

Indonesia dewasa ini dihadapkan dengan beberapa persoalan dan ancaman radikalisme, terorisme yang kesemuanya menyimpang dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Radikalisme dapat diartikan paham radikal yang menghendaki perubahan dengan menggunakan kekerasan. Paham ini sebenarnya paham politik yang menghendaki perubahan yang ekstrem, sesuai dengan ideologi yang mereka anut. Apabila Ideologi negara sudah tidak kokoh maka akan berdampak terhadap ketahanan nasional. Sedangkan pengertian terorisme menurut revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas kepada masyarakat, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan negara.

Lunturnya identitas lokal yang melanda generasi muda belakang ini dikatakan sebagai salah satu faktor penyebab radikalisme, kekosongan nilai yang dianut, sehingga paham radikal mulai mengisi kekosongan tersebut. Melalui peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang kini tengah dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Meningkatnya radikalisme dalam agama di Indonesia menjadi fenomena sekaligus bukti nyata yang tidak bisa begitu saja diabaikan ataupun dihilangkan. Radikalisme keagamaan yang semakin meningkat di Indonesia ini ditandai dengan berbagai aksi kekerasan dan teror.

Upaya membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai perekat keberagaman bangsa Indonesia, perlu dimulai sejak terjadi interaksi dalam kehidupan anak, yaitu keluarga. Keluarga adalah institusi sosial yang terkecil masyarakat, sehingga perlu dibangun keluarga Pancasila, yaitu tempat pembudayaan nilai-nilai Pancasila dengan baik, disemaikan benih-benih implementasi nilai-nilai Pancasila kepada anggotanya.

Fenomena tindak radikalisme dalam agama memang bisa dipahami secara beragam, namun secara esensial, radikalisme agama umumnya memang selalu dikaitkan dengan pertentangan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan kelompok agama tertentu. Dalam lingkup kelompok keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan menggunakan jalan kekerasan. Maraknya radikalisme di Indonesia dinilai makin mengkhawatirkan, bahkan berada di zona merah atau sangat perlu diwaspadai. Selain itu meningkatnya radikalisme dalam agama di Indonesia menjadi fenomena sekaligus bukti nyata yang tidak bisa begitu saja diabaikan ataupun dihilangkan. Radikalisme keagamaan yang semakin meningkat di Indonesia ini ditandai dengan berbagai aksi kekerasan dan teror.

Sebagai sebuah bangsa yang besar, kita wajib menyadari bahaya ini. Jika dibiarkan, tak ayal bangsa Indonesia akan terpecah-pecah dan akhirnya musnah. Mereka bekerja sangat rahasia dan radikal, dengan menolak sebagian besar premis yang melandasi lembaga-lembaga yang sudah ada dalam masyarakat. Bahkan pemerintah pun dianggap sebagai pemasung rakyat. Karena itu terorisme digolongkan ke dalam jenis kejahatan luar biasa.

B. Pembahasan

1. Lahirnya Radikalisme

Kata radikalisme ditinjau dari segi terminologis berasal dari kata dasar *radix* yang artinya akar (pohon). Dipahami secara *kilat*, bahwa orang yang berpikir radikal pasti memiliki pemahaman secara lebih detail dan mendalam, layaknya akar tadi, serta keteguhan dalam mempertahankan kepercayaannya.

Dawinsha mengemukakan defenisi radikalisme menyamakannya dengan teroris. Bahwa radikalisme itu mengandung sikap jiwa yang membawa kepada tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan kemapanan dan menggantinya dengan gagasan baru.

Dalam artian bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dalam kamus Bahasa Inggris, kata *radical* diartikan sebagai ekstrem atau bergaris keras. Radikalisme berarti suatu paham aliran yang menghendaki perubahan secara drastis atau *fundamental reform*. Paham ini sebenarnya paham politik yang menghendaki perubahan yang ekstrem, sesuai dengan pengejawantahan ideologi yang mereka anut. Setelah itu, penambahan sufiks -isme sendiri memberikan makna tentang pandangan hidup (paradigma), sebuah faham, dan keyakinan atau ajaran. Hal inilah yang menimbulkan kesan menyimpang di masyarakat. Inti dari radikalisme adalah paham radikal yang menghendaki perubahan dengan kecenderungan menggunakan kekerasan.

Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis pada abad 18. Kata Terorisme yang artinya dalam keadaan teror (under the terror), berasal dari bahasa latin "terrere" yang berarti gemetar dan "detererre" yang berarti takut.

Terorisme dan teroris sekarang ini memiliki arti politis dan sering digunakan untuk mempolarisasi efek yang mana terorisme tadinya hanya untuk istilah kekerasan yang dilakukan oleh pihak musuh, dari sudut pandang yang diserang. Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil daripada perang. Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang atau negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka.

Radikalisme erat dikaitkan dengan agama islam, padahal sesungguhnya tidak satu agamapun mengajarkan kekerasan pada sesamanya termasuk agama Islam. Secara historis, radikalisme yang diwarnai oleh agama bukanlah hal yang baru dinegeri ini, khususnya yang terkait dengan kelompok radikalisme Islam. Adanya radikalisme keagamaan sebenarnya merupakan

fenomena yang bisa terjadi di dalam agama apa pun. Radikalisme sangat berkaitan dengan fundamentalisme yang ditandai oleh kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar agama. Di beberapa negara muslim, gerakan-gerakan radikal keagamaan malah justru lahir pada saat prosesi demokratisasi sedang di gelar. Fundamentalisme akan diiringi oleh radikalisme dan kekerasan ketika kebebasan untuk kembali ke agama dihalangi oleh situasi. Gerakan-gerakan agama radikal di Indonesia pun juga lahir di saat proses demokratisasi sedang berjalan. Otonomi daerah sebagai refleksi dari tuntutan demokrasi misalnya, justru di tandai dengan bangkitnya literisme-radikalisme agama seperti kehendak untuk menerapkan "syariat islam". Namun tidak dapat menutup mata bahwa oknum yang menyebarkan isu perpecahan tersebut berkedok Islam sebagai pemeluk agama mayoritas di Indonesia. Di negara Indonesia, aksi kekerasan (teror) yang terjadi selama ini kebanyakan dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan/mendompleng agama tertentu. Agama dijadikan benteng oleh mereka untuk melakukan aksinya. Selain itu mereka juga menyelewengkan sejumlah pengertian dari kitab suci. Teks agama dijadikan dalih oleh mereka untuk melakukan tindak kekerasan atas nama jihad.

Beberapa contoh radikalisme keagamaan yang terjadi di Indonesia adalah munculnya berbagai kelompok agama yang berhaluan keras, seperti Hizbut Tahrir, Indonesia (HTI), Jama'ah Tabligh (JT), Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan, Pesantren Al-Mukmin (Ngruki), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Darul Islam/Negara Islam Indonesia, Front Pembela Islam (FPI) dan Jama'ah Salafi, Laskar Jihad Ikhwanul Muslimin, Ahlussunnah Wal Jama'ah, dan HAMMAS.

Sejarah kemunculan gerakan radikalisme dan kelahiran kelompok fundamentalisme dalam islam lebih di rujuk karena dua faktor, yaitu :

1. Faktor internal

Radikalisme disebagian masyarakat bisa muncul karena banyak hal. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pengetahuan tentang agama. Radikalisme ini merupakan sasaran yang tepat bagi orang-orang yang

berkedok menyelewengkan ajaran agama atau menyebarkan paham-paham keagamaan yang sesat.

Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tetapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya, dan bukan agama (wahyu suci yang absolut). Faktor internal lainnya adalah dikarenakan gerakan ini mengalami kekecewaan yang menyebabkan frustrasi yang mendalam karena belum mampu mewujudkan cita-cita berdirinya "negara islam internasional"

sehingga menyebabkan tindakan dengan cara anarkis seperti membumi hanguskan manusia dan sarana prasarana fasilitas umum

Faktor internal adalah adanya legitimasi Teks keagamaan, dalam melakukan "perlawanan" itu sering kali menggunakan legitimasi teks (baik teks keagamaan maupun teks "cultural") sebagai penopangnya. Untuk kasus gerakan "ekstrimisme islam" yang merebak hampir di seluruh wilayah islam (termasuk indonesia) juga menggunakan teks-teks keislaman (Alquran, hadits dan *classical sources*- kitab kuning) sebagai basis legitimasi teologis, karena memang teks tersebut secara tekstual ada yang mendukung terhadap sikap-sikap eksklusivisme dan ekstrimisme ini. Seperti ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk berperang seperti; *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.* (Q.S. Attaubah: 29).

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri dari beberapa sebab di antaranya : pertama, dari aspek ekonomi-politik, kekuasaan deprestik pemerintah yang menyeleweng dari nilai-nilai fundamental islam.

faktor sosial politik, pemerintah yang kurang tegas dalam mengendalikan masalah teroris ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu

faktor masih maraknya radikalisme di kalangan umat islam. Dosen Fisip Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, M Zaki Mubarak dalam diskusi yang mengupas tentang dilema penanganan terorisme di Indonesia. Menuturkan alasan utama kenapa kelompok-kelompok ini melakukan aksi radikal adalah karena ketidakpuasan kepada pemerintahan yang ada. Menurut mereka, tidak adanya pemimpin yang baik, menyebabkan negara diambang kehancuran. Selain itu, mereka percaya negara ini terlalu mudah disetir oleh kepemimpinan dunia barat. Ideologi yang mereka peroleh dari pendahulu mereka, bagi para kelompok radikal masa kini dianggap sebagai acuan dan alasan kuat untuk melakukan teror agar tujuan mereka dapat tercapai. Untuk sebagian golongan tertentu menganggap bahwa radikalisme adalah hal yang positif karena kepentingan mereka. Seperti pelaku terorisme yang menganggap tindakannya itu merupakan hal yang positif karena dia merasa berjihad atau berjuang untuk agama yang dianutnya. Selain pelaku terorisme dengan alasan keagamaan, terdapat para politikus, yang bisa berlaku sewenang-wenang yang hanya memikirkan diri sendiri demi merebut kekuasaan politik. contohnya para politikus yang melakukan tindakan radikalisme demi memenangkan kekuasaan ialah, dengan cara pemberontakan (GAM, OPM, RMS, dan lainnya).

Kemudian faktor budaya, faktor ini menekankan pada budaya barat yang mendominasi kehidupan saat ini, budaya sekularisme yang dianggap sebagai musuh besar yang harus dihilangkan dari bumi.

2. Dampak Negatif Radikalisme

Pancasila adalah Ideologi negara Indonesia untuk mempersatukan rakyat. Menurut Franz Magnis-Suseno (2011: 116-117), arti Pancasila sangatlah mendasar karena dua hal. Pertama karena kekhasan nasionalisme bangsa Indonesia, dan kedua karena pluralitas (kebhinnekaan) bangsa Indonesia. Persatuan bangsa Indonesia tidak bersifat etnik (tidak hanya satu bahasa seperti Jerman atau satu wilayah seperti Korea) melainkan etis (memiliki pengalaman yang sama hingga timbul hasrat membangun masa depan).

Sementara pluralitas di Indonesia sangatlah besar. Pluralitas budaya, bahasa, geografis, agama, dan penghayatan keagamaan. Maka kebangsaan Indonesia jangan pernah *taken for granted*. Indonesia namun sangat disayangkan Pancasila mulai pudar karena mulai sedikit orang yang mengetahui makna dari Pancasila tersebut, di samping itu muncunlah beberapa faktor radikalisme yang di buat segelintir orang untuk mencapai tujuan tertentu tetapi dengan menggunakan cara yang menyimpang bahkan menggunakan kekerasan sampai pembunuhan.

Semua gerakan yang dilakukan oleh pelaku radikalisme sangat menyimpang dengan makna Pancasila. Banyak gerakan radikalisme yang mengatasnamakan agama tertentu. Tentu dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, di dalam sila ini tidak mengartikan tentang bagaimana gerakan radikalisme di sebar, tetapi sila tersebut memberi tahu bahwa semua masyarakat yang berada di Indonesia mempunyai hak memeluk agamanya sendiri-sendiri. Dampak negatif dari gerakan radikalisme itu sendiri adalah banyaknya pemberontakan yang mengatasnamakan agama, contohnya saja aksi terorisme yang melakukan pemberontakan dengan cara merusak fasilitas dan membunuh atau melakukan bom bunuh diri.

Tujuannya adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang melakukan maksiat. Meskipun agama berbeda-beda tetapi ajaran agama tersebut tidak ada yang mengajarkan bahwa pemberontakan harus dilakukan apalagi dengan cara membunuh atau megebom. Dampak lainnya adalah jika di suatu negara terdapat gerakan radikalisme dan gerakan tersebut sangat eksis, negara tersebut akan di klaim sebagai negara yang melahirkan orang-orang yang khusus mengikuti gerakan radikalisme.

Salah satu kejadian yang pernah terjadi di Indonesia adalah bom bunuh diri di Bali terjadi 2x yang mengakibatkan kematian. Pada saat itu para turis mancanegara sedang menikmati waktu libur tetapi kejadian naas membuat mereka trauma dan ketakutan akibat ledakan bom. Setelah kejadian tersebut kemudian di susul oleh bom bunuh diri di Hotel J.W Marriott. Bom bunuh diri ini semakin meresahkan Pemerintah Indonesia untuk mengetahui dalang dibalik kejadian tersebut dan motif apa mereka melakukan tindakan keji.

3. Hubungan radikalisme dengan Pancasila

Pancasila diakui negara sebagai falsafah hidup, cita-cita moral, dan ideologi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga berbagai perundangan dan peraturan baik di pemerintahan maupun pemerintahan daerah sudah seharusnya tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila diyakini mampu menyaring berbagai pengaruh ideologi yang masuk ke Indonesia sebagai konsekwensi logis dari sebuah masyarakat dan bangsa yang majemuk (bhinneka). Namun, sampai sejauh ini masih banyak perundangan yang tidak memusatkan nilai-nilai sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Bahkan uji materil perundangan di Mahkamah Konstitusi hanya diuji pada batang tubuh (pasal-pasal) saja tetapi tidak diuji dari Pembukaan UUD 1945. Alhasil Pancasila sebagai 'pusat kekuatan' kurang berdampak pada kehidupan bangsa dan negara secara menyeluruh.

Bangsa Indonesia tidak menafikan kehadiran budaya luar maupun ideologi luar, tapi melalui Pancasila warga negara Indonesia dapat menyaring pengaruh mana yang dapat diterima atau tidak. Negara juga mampu menyesuaikan pengaruh luar tersebut dengan konteks budaya Indonesia ataupun menolak karena tidak sesuai dengan falsafah, cita-cita, moral, dan ideologi nasional

Selain itu Pancasila juga berfungsi sebagai falsafah hidup bangsa yang konsep dan visinya dapat diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Terdapat lima sila yang secara komprehensif menjabarkan arti kehidupan bernegara yang dapat dijadikan landasan melawan ancaman ideologi radikal.

1. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini mengandung makna toleransi, antar umat beragama di Indonesia. Ideologi fundamentalis radikal sangat bertentangan dengan

Pancasila karena ideologi tersebut memaksakan kehendak dengan menolak keberagaman dan merasa bahwa pilihannya sudah benar di jalan Tuhan.

2. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Menjadi warga negara Indonesia yang adil dan beradab merupakan keharusan. Beradab dapat dimaknai memiliki karakter yang baik, tentunya dengan menjadi manusia yang adil dan memiliki karakter yang baik, kesejahteraan dan kenyamanan hidup rakyat Indonesia akan tercapai. Pada sila ini mengandung makna pengakuan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, dan hak sosial budaya. Maka paham terorisme dan radikalisme sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, karena tindakan tersebut telah melanggar dari norma agama, adat istiadat, dan budaya. Di dalam budaya Indonesia maupun norma-norma yang berlaku di Indonesia tidak diakuinya untuk menghalalkan membunuh orang yang tidak bersalah maupun bunuh diri itu semua tidak dibenarkan. Begitu juga dengan Islam, dimana prinsip salah satu hukumnya adalah menjaga nyawa (*hifdzun naf*).

Maka tindakan terorisme sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah negara dan kaidah agama Islam. Paham inilah yang harus ditanam sejak dini supaya generasi penerus bangsa memiliki landasan yang kuat dalam menangkis terorisme. Dengan demikian, pemaksaan kehendak oleh kelompok radikal secara hakiki bertentangan dengan Pancasila karena jelas melanggar HAM yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia

Sila ini mengandung makna bahwa Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan asas kebangsaan, bukan atas dasar agama, suku, atau ras tertentu. Atas nama Indonesia, mempertahankan negara kesatuan Indonesia merupakan kewajiban untuk warga negara Indonesia. Maka menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk cinta terhadap bumi pertiwi. Kelompok fundamentalis

radikal yang ingin mengubah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dari negara kebangsaan menjadi negara dengan golongan agama tertentu. Hal ini tentunya jelas bertentangan dengan landasan ideologi nasional Pancasila.

4. Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila ini mengandung arti bahwa sistem kemasyarakatan dan kenegaraan di Indonesia harus berlandaskan pada prinsip demokrasi dan kedaulatan berada di tangan rakyat dari rakyat untuk rakyat. Menaati pemerintah dan perangkatnya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, begitu juga dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Jadi, anggapan bahwa pemerintah adalah *thoghut* merupakan persepsi atau faham yang sangat bertentangan dengan agama Islam, norma, dan adat-istiadat Indonesia, khususnya Pancasila. Bagi kelompok fundamentalis radikal bahwa demokrasi adalah haram. Pada umumnya ideologi agama radikal menolak kedaulatan rakyat dan hanya mengakui kedaulatan Tuhan yang dilaksanakan melalui sistem teokrasi.

5. Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini mengandung makna bahwa kesejahteraan sudah menjadi hak warga negara RI. Rakyat Indonesia harus menjadi rakyat yang adil, berjiwa sosial dengan saling membantu satu sama lain, saling menerima dan menghargai, tidak diskriminasi, toleransi, karena rakyat Indonesia memiliki hak yang sama, hak untuk hidup, hak berkreasi dan berkarya, tanpa melihat dan membedakan warna kulit dan asal usul sehingga menjadi rakyat yang sejahtera. Bagi kelompok fundamentalis radikal tidak mengakui adanya hak bagi warga negara untuk memperoleh rakyat Indonesia harus menjadi rakyat yang adil.

4. Upaya Pemerintah Selama Ini dalam Mengatasi Gerakan Radikalisme di Indonesia

Idiologi Pancasila sebenarnya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, hanya saja nilai-nilai yang terkandung didalamnya tidak dijiwai oleh bangsanya sendiri. Sehingga paham radikalisme bisa dengan mudahnya menembus pemikiran bangsa ini. Padahal Pancasila sebagai idiologi bangsa ini sangatlah penting dipahami dan dijiwai. Sebab nilai-nilai yang terkandung didalamnya memiliki tujuan yang mulia dan dapat membawa bangsa ini kedalam peradaban yang baik.

Pemerintahan Indonesia sangat perlu melakukan tindakan pendekatan preventif atau pencegahan kepada semua kalangan generasi penerus bangsa, agar dapat menghentikan penyebaran radikalisme di kalangan generasi penerus bangsa yang semakin taun semakin memprihatinkan. Namun tidak dapat dipungkiri, radikalisme juga dapat dengan mudah masuk di Indonesia yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya untuk mengatasi radikalisme di Indonesia. Sebagai contoh Instansi kepolisian misalnya, mereka telah menyiapkan pasukan khusus untuk memberantas gerakan radikalisme di Indonesia.

Prof. Dr. Arief Rahman, MA selaku (Guru Besar UNJ/Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO) mengatakan bahwa dalam menanggulangi radikalisme, sebaiknya pendidikan di Indonesia sebaiknya tidak dititik beratkan kepada kecerdasan akal nya saja. "Semua pendidik harus mampu untuk kecerdasan spiritual dalam diri individu masing-masing," kata Arief Rahman.

Semakin banyak generasi muda yang telah terpengaruh dalam pemikiran radikal maka semakin cepat juga dalam penyebaran gerakan radikalisme di negara Indonesia, karena bisa saling memprovokasi sesama pemuda dalam melakukan tindakan menyimpang seperti radikalisme.

Serangkaian aksiterorisme mulai dari Bom Gereja Kepunton, Bom Bali-1, bom di JW, Marriot dan Hotel Ritz-Carlton, hingga aksi brutal penembakan Pos Polisi Singosaren di Solo dan Bom di Beji dan Tambora, yang melibatkan pemuda. Sebut saja, Dani Dwi Permana, merupakan salah satu pelaku Bom di JW Marriot dan Hotel Ritz-Carlton, yang saat itu berusia genap 18 tahun.

Rentannya generasi muda terhadap aksi kriminal dan radikalisme sudah seharusnya menjadi keprihatinan kita sebagai rakyat Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan generasi muda terseret ke dalam lembah negatif diantaranya, kemiskinan, kurangnya pengetahuan pendidikan agama yang benar, gencarnya masuknya kelompok radikal, kurangnya kesadaran semangat kebangsaan, kurangnya pengetahuan pendidikan kewarganegaraan, kurangnya contoh keteladanan, dan lunturnya nilai-nilai kearifan lokal oleh arus modernisasi negatif.

Untuk membentengi generasi muda dan masyarakat umum dari radikalisme dan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menggunakan upaya penanggulangan melalui kontra-radikalisasi (penangkalan ideologi). Hal tersebut dilakukan dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah, Pelatihan anti radikal-terorisme bagi ormas, *Training of Trainer* (ToT) bagi sivitas akademika perguruan tinggi, serta sosialisasi kontra radikal terorisme siswa SMA di empat provinsi. Ada beberapa hal yang patut dikedepankan dalam pencegahan terorisme di kalangan pemuda :

1. Pertama, memperkuat pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Melalui pendidikan kewarganegaraan, para pemuda didorong untuk menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal seperti toleransi antar-umat beragama, kebebasan yang bertanggung jawab, gotong royong, kejujuran, dan cinta tanah air serta kepedulian antar-warga masyarakat.

2. Kedua, mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya, maupun olahraga.
3. Ketiga, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Dalam hal ini, peran guru agama di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting.
4. Keempat, memberikan keteladanan kepada pemuda. Sebab, tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia.

Keluarga Pancasila

Upaya implementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai perekat keberagaman negara Indonesia, perlu dimulainya sejak terjadi interaksi dalam fase kehidupan anak sejak dini, yaitu keluarga. Keluarga adalah inti dari pergaulan sosial yang paling kecil dalam masyarakat, sehingga diperlukan adanya keluarga Pancasila, yaitu tempat penerapan nilai-nilai Pancasila dengan baik, ditanamkan benih-benih implementasi nilai-nilai Pancasila kepada anggotanya keluarga tersebut.

Contoh penerapan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam keluarga. Sila pertama ini diserap sebagai identitas kebangsaan Indonesia yang memberikan apresiasi terhadap toleransi atas perbedaan keagamaan. Sehingga kita memberikan toleransi kepada masing-masing umat pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan kepercayaan yang kita anut dengan kepercayaan orang lain

Dengan membangun Keluarga Pancasila, kita telah berhasil menerapkan nilai toleransi, antiterorisme, sikap hidup saling menghormati, tenggang rasa, sopan santun, antiradikalisme, dan saling menyayangi. Sikap dan perilaku hidup yang damai tersebut merupakan contoh keluarga yang membudayakan Pancasila. Di mulai dari dalam rumah kemudian ketika di luar rumah mereka

juga akan memberikan teladan untuk orang lain sehingga terjadinya kekuatan kebangsaan yang erat sehingga tidak mudah masuk golongan radikal

Dalam Undang-undang Sisdiknas dinyatakan bahwa pengetahuan dan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak kreatif, mulia, berilmu, cakap, mandiri, sehat, dan menjadi warga negara Indonesia yang mempunyai jiwa demokratis serta bisa bertanggung jawab.

Hakikatnya fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut adalah untuk mengantarkan peserta didik menjadi manusia Pancasila. Karenanya semua jenis mata pelajaran jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi harus memberikan kontribusi pada pencapaian manusia Pancasila. Sebagai konsekuensinya, seluruh pendidik di semua jenis dan jenjang pendidikan apapun mata pelajaran yang diampu, harus memberikan kontribusi terhadap pencapaian manusia Pancasila tersebut. Bahkan kegiatan ekstra kurikuler juga harus berkontribusi dalam pembudayaan nilai-nilai Pancasila.

Bagaimana cara menyiapkan seluruh tenaga pendidik mata pelajaran dalam kurikulum di semua jenis dan jenjang pendidikan dapat mengintegrasikan dan memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam mata pelajaran yang diampunya? Untuk merealisasikan hal ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perlu bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kemenristekdikti untuk memberikan bimbingan teknis dalam membekali para guru dan dosen di negeri ini.

Sadar Pancasila

Selanjutnya perlu dilakukan upaya menumbuhkembangkan sadar Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat kalangan tua maupun muda. Sadar Pancasila merupakan konsep yang menggambarkan partisipasi dan

dukungan masyarakat dalam mendorong terwujudnya suasana kehidupan yang kondusif bagi pelaksanaan pembudayaan Pancasila. Sejatinya karakteristik masyarakat dan Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang berideologi Pancasila, yaitu masyarakat yang toleransinya sangat tinggi, gotong royong, guyub rukun, saling tolong menolong, kekeluargaan, bekerja sama, dan sebagainya.

Para pendiri negara sudah mencontohkan bahwa kecintaan terhadap persatuan, kebersamaan, dan tanah air yang melebihi kecintaannya terhadap keluarga, kelompok, dan bahkan agamanya. Sebagai bukti? Ketika ada suatu penolakan terhadap suatu rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta saat akan ditetapkan menjadi Pembukaan UUD 1945, maka para tokoh Islam merelakan dihapusnya tujuh kata pada sila pertama Pancasila, persatuan, demi menjaga kebersamaan, dan cinta tanah airnya. Untuk mem-Pancasila-kan warga negara Indonesia sebenarnya hanya diperlukan menegaskan dan membudayakan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri, jiwa, dan kepribadian bangsa Indonesia.

Radikalisme merupakan paham radikal yang menghendaki perubahan sosial dengan cara kekerasan. Paham ini sebenarnya paham politik yang menghendaki perubahan ekstrem, sesuai dengan pengejawantahan ideologi yang mereka ikuti atau percaya. Apabila Ideologi suatu negara sudah tidak kokoh maka akan berdampak terhadap ketahanan nasional. Sedangkan pengertian terorisme menurut revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan negara.

Menangkal ideologi radikalisme global antara lain :

Upaya mendasar yang paling efektif untuk menangkal ideologi radikalisme global adalah dengan memperkuat ketahanan nasional dalam bidang ideologi. Antara lain dengan meningkatkan relevansi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara, sehingga rakyat bukan saja memahaminya secara efektif dan menindaklanjutinya secara psikomotoris. Dengan cara demikian, bukan saja kewibawaan Pancasila semakin meningkat oleh karena didukung oleh kenyataan, tetapi juga daya tarik ideologi radikalisme global semakin menurun.

Upaya mendasar berikutnya untuk memberantas ideologi radikalisme global yaitu dengan mempelajari pola pikir yang paling dalam dari ideologi radikalisme global tersebut dan membuktikan kekeliruan dan kelemahan dalil-dalil yang dianutnya, bukan saja dari aspek internal tetapi juga dari aspek eksternalnya.

Upaya pencegahan yang sangat efektif yang dalam mencegah timbulnya minat terhadap ideologi radikalisme global adalah dengan memusnahkan kondisi yang akan memungkinkan tumbuh dan berkembangnya ideologi tersebut, antara lain dengan menegakkan keadilan kebenaran, menghargai harkat dan martabat manusia, mencegah terjadinya diskriminasi sosial dan mencegah tindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Mengambil tindakan preventif serta represif yang tepat dan cepat terhadap indikasi telah adanya aksi-aksi radikalisme di dalam masyarakat.

Membentengi Pemuda Dari Radikalisme

Pemuda adalah aset bangsa yang sangat berharga. Masa depan negeri ini bertumpu pada kualitas mereka. Namun ironisnya, kini tak sedikit kaum muda yang justru menjadi pelaku terorisme. Serangkaian aksiterorisme mulai dari Bom Bali-1, Bom Gereja Kepunton, bom di JW Marriot dan Hotel Ritz-Carlton, hingga aksi penembakan Pos Polisi Singosaren di Solo dan Bom di Beji dan Tambora, melibatkan pemuda. Sebut saja, Dani Dwi Permana, salah satu

pelaku Bom di JW Marriot dan Hotel Ritz-Carlton, yang saat itu berusia 18 tahun dan baru lulus SMA.

Fakta di atas diperkuat oleh riset yang dilakukan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP). Dalam risetnya tentang radikalisme di kalangan siswa dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Jabodetabek, LaKIP menemukan sedikitnya 48,9 persen siswa menyatakan bersedia terlibat dalam aksi kekerasan terkait dengan agama dan moral.

Rentannya pemuda terhadap aksi kekerasan dan terorisme patut menjadi keprihatinan kita bersama. Banyak faktor yang menyebabkan para pemuda terseret ke dalam tindakan terorisme, mulai dari kemiskinan, kurangnya pendidikan agama yang damai, gencarnya infiltrasi kelompok radikal, lemahnya semangat kebangsaan, kurangnya pendidikan kewarganegaraan, kurangnya keteladanan, dan tergerusnya nilai kearifan lokal oleh arus modernitas negatif.

Untuk membentengi para pemuda dan masyarakat umum dari radikalisme dan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menggunakan upaya pencegahan melalui kontra-radikalisasi (penangkalan ideologi). Hal ini dilakukan dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah, Pelatihan anti radikal-terorisme bagi ormas, *Training of Trainer* (ToT) bagi sivitas akademika perguruan tinggi, serta sosialisasi kontra radikal terorisme siswa SMA di empat provinsi. Ada beberapa hal yang patut dikedepankan dalam pencegahan terorisme di kalangan pemuda :

Pertama, memperkuat pendidikan kewarganegaraan (civic education) dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Melalui pendidikan kewarganegaraan, para pemuda didorong untuk menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal seperti toleransi antar-umat beragama, kebebasan yang

bertanggung jawab, gotong royong, kejujuran, dan cinta tanah air serta kepedulian antar-warga masyarakat.

Kedua, mengarahkan para pemuda pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya, maupun olahraga.

Ketiga, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, sehingga pemuda tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Dalam hal ini, peran guru agama di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting.

Keempat, memberikan keteladanan kepada pemuda. Sebab, tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia.

C. Kesimpulan

Letak Indonesia yang strategis yang terdiri atas nusantara menyebabkan Indonesia sering dilewati oleh negara lain. Indonesia sendiri terdiri dari beraneka ragam budaya sehingga pengaruh paham radikalisme dapat dengan mudah masuk dan menyebar di negara Indonesia. Radikalisme sudah menularkan aliran-aliran ekonomi, budaya, sosial, dan politik, Di Indonesia, maraknya kekerasan (teror) yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatas namakan/mendompleng golongan agama tertentu

Gerakan radikalisme di Indonesia sangat merugikan ketatanegaraan NKRI dan juga menyimpang Pancasila. Radikalisme juga dapat menjadikan bangsa kita dipandang rendah oleh negara lain sehingga ekonomi negara akan melemah, dengan demikian pemerintahan Indonesia harus memulihkan hal tersebut yang tentu merugikan semua aspek ketatanegaraan. Selain itu radikalisme bertentangan dengan pancasila sila pertama Ketuhanan yang maha esa. Tidak ada satupun kepercayaan yang diakui di Indonesia yang mengajarkan, menyebarkan, paham radikalisme untuk mencapai tujuan dari golongan orang-orang bertanggung jawab.

- 1) Radikalisme merupakan ancaman terhadap ketahanan ideologi. Radikalisme adalah paham radikal yang menghendaki perubahan dengan kecenderungan menggunakan kekerasan. Paham ini sebenarnya paham politik yang menghendaki perubahan yang ekstrem, sesuai dengan pengejawantahan ideologi yang mereka anut. Indonesia sebagai negara yang plural dimana terdapat berbagai macam suku, ras, budaya dan juga agama menjadi sasaran paham radikal berbau SARA tumbuh dan berkembang.
- 2) Pancasila adalah falsafah hidup, cita-cita moral, dan ideologi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila diyakini mampu menyaring berbagai pengaruh ideologi yang masuk ke Indonesia sebagai konsekwensi logis dari sebuah masyarakat dan bangsa yang majemuk (bhinneka). Namun sayangnya nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila tidak dijiwai oleh bangsanya sendiri, sehingga paham radikalisme bisa dengan mudahnya menembus pemikiran bangsa ini dan tumbuh subur di Indonesia.

D. Acknowledgments

None

E. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

F. Funding Information

None

G. References

- A Rubaidi, 2007, *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, Logung Pustaka, Yogyakarta, h. 33
- A.S Hornby, 2000, *Oxford Advanced : Dictionary of Current English*, Oxford University Press, UK, h. 691
- Agus SB, 2016, *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*, Daulat Press, Jakarta, h. 238
- Ahmad Norma Permata, 2005, *Agama dan Terorisme*, Muhammadiyah University Press, Yogyakarta h.78.
- Ahmad Nurcholish dan Alamsyah M. jakfar, 2015, *Agama Cinta, Menyelami Samudra Cinta Agama-Agama*, Elex Media Komputindo, Jakarta, h.205
- Endang Turmudzi dkk, 2004, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, h.5
- M. Arib Herzi S, *Radikalisme*, <http://aribherzi020696.blogspot.co.id/2015/04/makalah-radikalisme.html>
- Muhammad A.S. Hikam, 20016, *Deradikalisasi : Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Kompas, Jakarta, h. 34
- Muhammad Shobahus Sadad, Ahmad Muzaqqi, Dan Erlina, Menelisik Kembali Arti Radikalisme Dan Integrasinya Dengan Praktek Kekerasan Dalam Perspektif Agama, <http://2beahumanbeing.blogspot.co.id/2012/06/makalah-radikalisme-pengertian-konsep.html>
- Sumanto Alqurtuby, 2009, *Jihad Melawan Ekstrimis Agama, Membangkitkan Islam Progresif*, Borobudur Indonesia , Semarang